

BAB II

DINAMIKA KONFLIK SURIAH

Bab II adalah Pembahasan konflik di Suriah, mulai dari awal pembentukan Suriah, proses transisi kepemimpinan Bashar al-Assad dan keadaannya hingga saat ini, kebijakan Bashar al-Assad yang kontroversial dan awal mula konflik Suriah kontemporer.

A. Lahirnya Negara Suriah

Pembahasan konflik di Suriah, mulai dari awal pembentukan Suriah, peristiwa Arab Spring hingga pasca Arab Spring, dan keadaannya hingga saat ini. Suriah pada awalnya merupakan bagian dari Negara Republik Arab (H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, hal 224). Nama Suriah atau Syria berasal dari bahasa Arab, Al- Sham atau Levant dalam bahasa Inggris. Daerah yang ditunjuk oleh kata ini telah berubah dari waktu ke waktu. Suriah terletak di ujung timur Mediterania, antara Mesir dan Saudi Arabia di selatan dan Kilikia di utara. Peregangan pedalaman untuk memasukan Mesopotamia dan memiliki batas ke timur laut yang menggambarkan dari barat ke timur, Commagene, Shopene dan Adiabene. Keadaan geografi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sejarah Suriah.(Ensiklopedia Geografi, Intermassa cetakan tahun 1990, hal 217). Suriah memiliki bahasa resmi bahasa Arab dengan satuan mata uang Pound Syria. Sebagai sebuah Negara dengan berbagai entitas (memiliki keberadaan yang unik dan berbeda) di dalamnya, Suriah terdiri atas mayoritas komunitas Muslim Sunni 75%,

yang secara historis tetap dominan, dan beberapa komunitas lainnya: Kristen 19%, dan 1,5%, yang sebagian besar di pedesaan, khususnya kaum Alawiy. (Shireen T Hunter, *Politik kebangkitan Islam*, 2001, hal 59).

Keadaan geografi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sejarah Suriah, negeri yang sudah dihuni manusia sejak zaman batu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Suriah pernah menjadi salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Karena terletak di persilangan jalur perdangan dan militer antara Laut Tengah, Mesopotamia, dan Mesir, maka Suriah menjadi sasaran penyerbuan dari Negara-negara tetangganya.

Suriah juga merupakan tempat sejarah Kekristenan yang paling berpengaruh, Saulus dari Tarsus telah melewati jalan ke Damaskus, kemudian di kenal sebagai Rasul Paulus, dan muncul sebagai tokoh penting dalam Gereja Kristen terorganisir pertama di Antiokhia di Suriah kuno, yang mana ia meninggalkan jejak perjalanan misionaris.

Pada 1920, kerajaan Suriah didirikan oleh Faisal 1 dari keluarga Hashimiah, yang kemudian menjadi Raja Irak. Namun, pemerintahannya di Suriah berakhir setelah hanya beberapa bulan, setelah bentrokan antara pasukan Arab Suriah dan pasukan Prancis pada pertempuran Maysalun. Pasukan Prancis menduduki Suriah setelah konferensi San Remo dan meminta kepada Liga Bangsa- Bangsa untuk menempatkan Suriah di bawah mandat Prancis.(Peter N Streans, William Leonard Langer, *Ensiklopedi of World History “ The Midle East ”*. Hal 761).

Pada tahun 1925 Sultan Pasha Al- Atrash memimpin pemberontakan di Druze dan menyebar ke seluruh bagian Suriah dan Lebanon. Hal ini dianggap sebagai salah satu revolusi yang paling penting terhadap mandate Prancis, karena pertempuran mencakup seluruh Suriah dan menyaksikan pertempuran sengit antara pemberontak dan pasukan Prancis. Pada 23 Agustus 1925 Sultan Pasha Al- Atrash resmi menyatakan revolusi melawan Prancis, dan segera meletus pertempuran Damaskus, Homs dan Hama. Al- Atrash memenangkan beberapa pertempuran melawan Prancis pada awal revolusi, terutama pertempuran Al- Kabir pada tanggal 21 Juli 1925, pertempuran al- Marza pada tanggal 2 Agustus 1925, dan pertempuran di dataran Almsifarh dan Suwayda.

Setelah mengalami kekalahan, kemudian Prancis mengirimkan ribuan pasukan ke Suriah dan Lebanon dari Maroko dan Senegal yang dilengkapi dengan senjata modern. Hal ini secara dramatis mengubah hasil pertempuran dan mengizinkan Prancis untuk memperoleh kembali banyak kota, meskipun perlawanan berlangsung sampai musim semi 1927. Prancis menghukum mati Sultan al- Atrash, tapi ia melarikan diri dan para pemberontak akhirnya diampuni oleh Prancis. Ia kembali ke Suriah pada 1937 setelah penandatanganan Perjanjian Prancis-Suriah.

Suriah dan Prancis merundingkan 7% perjanjian kemerdekaan pada bulan September 1936, dan Hashim al- Atassi, yang merupakan Perdana Menteri di bawah pemerintahan Raja Faisal, adalah Presiden pertama yang di pilih di bawah konstitusi baru, yang juga merupakan titik awal pertama dari republic modern Suriah. Namun, perjanjian tersebut tidak pernah berlaku karena legislative Prancis menolak untuk

meratifikasinya. Dengan jatuhnya Prancis pada tahun 1940 selama perang Dunia II, Suriah berada di bawah control pemerintah Vichy sampai Inggris dan Prancis merdeka dan menduduki Negara itu kembali pada bulan Juli 1941. Suriah memproklamkan kemerdekaannya lagi tahun 1941, namun tidak sampai 1 Januari 1944 negara tersebut diakui sebagai republik merdeka. Pada bulan April 1946, Prancis mengundurkan tentara mereka karena mendapat tekanan dari kelompok-kelompok nasionalis Suriah dan Inggris, dan kemudian meninggalkan Suriah di tangan pemerintahan republik yang telah terbentuk selama mandat. (Syria "*bureau of Near Eastern Affair*", United States Departement of State, May 2007).

Melihat ada cara untuk mempertahankan posisinya melalui manuver dalam negeri, pemerintah Suriah berbalik ke Mesir dan meminta bantuan kepada Presiden Gamal Abdul Nasser. Diskusi tentang persatuan antara Suriah dan Mesir telah dilaksanakan pada tahun 1956 tetapi sempat terganggu oleh krisis terusan Suez. Kemudian opsi tentang persatuan Mesir dan Suriah kembali dibicarakan pada bulan Desember 1957, ketika Partai Ba'at mengumumkan bahwa telah terjadi perundingan untuk bersatu dengan Mesir.

Persatuan Suriah dan Mesir di Republik Persatuan Arab (RPA) diumumkan pada tanggal 1 Februari 1958, dan kemudian di ratifikasi oleh plebisit (Pemungutan suara umum untuk menentukan status daerah) di setiap Negara. Namun, bentuk RPA bukan seperti apa yang telah disiapkan oleh para anggota partai Ba'ath. Salah satu alasan Nasser untuk menyetujui bentuk serikat adalah bahwa kedua Negara benar- benar terintegrasi. Persatuan ini tidak berjalan lama, sehingga pada 28

September 1961 terjadi kudeta militer dan membuat Suriah akhirnya memisahkan diri dan kembali menjadi Negara Republik Suriah. Kemudian, cabinet baru di bentuk dengan partai Ba'ath sebagai penguasanya.

Kudeta militer kembali terjadi di Suriah pada 13 November 1970, dimana Menteri Pertahanan Suriah pada masa itu, Hafiz al- Assad, menobatkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Selama Suriah berada di bawah kepemimpinan Hafiz al- Assad, hingga ia tutup usia pada 10 Juni 2000. Kemudian, tampuk kepemimpinan di lanjutkan oleh anaknya, Bashar al- Assad, hingga saat ini.

B. Transisi Kepimpinan kepada Bashar al- Assad

Presiden Suriah hingga saat ini adalah Bashar al- Assad. Ia menjabat sebagai Presiden sejak tahun 2000 menggantikan mendiang ayahnya, Hafiz al-Assad yang meninggal di tahun yang sama. Selain sebagai Presiden, Bashar juga menjabat sebagai Sekretaris Wilayah partai Ba'ath. Pada mulanya, pilihan untuk meneruskan tampuk kepemimpinan jatuh kepada Rif'at al-Assad, yang merupakan adik dari Hafiz al- Assad, kepada pusat pertahanan, sebelum akhirnya badan tersebut bergabung kedalam Syirian Army pada pertengahan tahun 1980an. Namun akhirnya, kepercayaan padanya hilang setelah ia terang-terangan melakukan konspirasi untuk menurunkan kakanya, Hafiz al- Assad, saat ia koma.

Setelah sembuh dari koma, Hafiz mulai menurunkan adiknya dari kursi pemerintahan, dan berakhir dengan pemecatan Rif'at dari posisinya sebagai wakil Presiden bagian keamanan nasional. Pilihan selanjutnya untuk meneruskan

kemimpinan jatuh kepada anak tertuanya, Basil al- Assad. Pada permulaan tahun 1990, Hafiz berkerja keras mempersiapkan Basil untuk menjadi Presiden Suriah selanjutnya. Namun, kecelakaan mobil pada tahun 1994 telah merenggut nyawa Basil.

Ketika saudaranya meninggalkan dalam kecelakaan, Bashar al- Assad, salah satu anak laki-laki Hafiz, sedang menempuh pendidikan dokter spesialis mata (ophthalmology). Pidato resmi selama pemakaman Basil, berkali- kali mengarahkan bahwa penerus selanjutnya adalah Bashar. Segera setelah itu, usaha peningkatan kekuasaan pada Bashar pun di mulai. Ia di tugaskan untuk menggantikan posisi kakaknya, Basil al-Assad, sebagai pasukan penjaga keamanan Negara. Setelah tahun 1998, ia di percayakan untuk mengemban tanggung jawab atas kebijakan Negara Suriah terhadap Lebanon dan memimpin kampanye melawan korupsi. Bashar dilatih secara bertahap agar siap menggantikan ayahnya sebagai Presiden. Persiapan tersebut dilakukan melalui tiga tahap: pertama, di bangun sebuah kekuatan dukungan untuk Bashar di bidan militer dan perlindungan. Kedua, membangun kesan dan figur sosok seorang Bashar al- Assad. Ketiga, Bashar di perkenalkan lebih mendalam dengan mekanisme untuk mengatur Negara. Sementara persiapan Bashar terus dilaksanakan, Hafiz al- Assad secara hati- hati terus mengganti anggota pasukan keamanan yang terlihat menolak pengangkatan Bashar sebagai penggantinya kelak. Salah satu orang terkemuka yang ikut di copot dari posisi adalah Hikmat al- Shibabi(Perwira militer Suriah). Seorang kepala staff

angkatan bersenjata.(Nadjib Ghadbian“ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria” Middle East Journal, Vol 55, No.4 (2001) hal. 626).

Transisi kepemimpinan Hafiz al- Assad kepada putranya, Bashar al- Assad, tahun 2000 berjalan begitu lancar. Tidak ada pergolakan menentang kepemimpinan Bashar saat itu. Untuk melurukan rencana tersebut, Hafiz pun telah merubah konstitusi perihal batas minimal 34 tahun agar Bashar bisa menduduki posisi presiden tersebut. Untuk mencapai posisi Presiden itu pun, Bashar al- Assad mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jendral dan menetapkannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Suriah. Transisi kepemimpinan tersebut tidak lepas dari peran para petinggi di pemerintahan seperti, menteri pertahanan Letnan Jendral Mustafa Tlas, kepala staf angkatan bersenjata Letnan Jendral Ali Aslan, Mayor Jendral Asif Shawkat, Mayor Jendral Bahjat Sulayman yang merupakan saudara ipar Bashar dan juga petinggi di badan intelijen, dan kepala badan keamanan Negara Mahir al-Assad yang juga merupakan adik ipar Bashar al- Assad. Satu- satunya orang yang bukan termasuk sekte Alawiy adalah Mustafa Tlas yang telah berakhir di militer sejak Hafiz al- Assad berkuasa

C. Pemerintahan Bashar al-Assad

1. Kebijakan Luar Negeri

Saat melaksanakan tugasnya sebagai Presiden, awalnya Bashar memiliki sikap yang berbeda dengan mendiang ayahnya. Ada beberapa kebijakan yang dilanjutkan olehnya, namun ada pula yang berbeda untuk membuktikan bahwa

sikap yang ia ambil lebih efektif dan berhasil. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Bashar terutama pada kebijakan luar negeri diantaranya alasan proses damai Negara Arab dengan Israel, kehadiran militer Suriah di Lebanon, dan hubungan Suriah dengan dunia.

Permasalahan dataran Golan yang diambil dari Suriah oleh Israel, dan keengganan Israel untuk mengembalikan seluruh wilayah yang merupakan wilayah Suriah sebelum tahun 1967 (Perang Enam Hari atau perang Arab- Israel). Dan seluruh perjanjian dengan mengembalikan kembali wilayah Palestina seperti sebelum terjadinya intifa Al-Aqsha (gelombang kerusuhan yang terjadi dua kali di Palestina 1987 dan 2005). Di pihak lain, kepemimpinan Bashar tidak segera melanjutkan negosiasinya dengan Israel perihal dataran tinggi Golan. Padahal semasa ia menjabat sebagai Presiden, Hafiz al- Assad, selalu menekankan Israel untuk segera mengembalikan dataran tinggi Golan. Apa yang dilakukan Hafiz tersebut membuat rakyat Suriah dan Arab begitu menghormatinya. Selain itu, mereka juga menghormatinya karena perbedaan sikap yang di tunjukan Hafiz al- Assad terhadap Israel berbeda dengan para pemimpin Negara Arab lainnya, seperti Anwar Sadat (Mesir), Raja Husein (Jordania), dan pemimpin PLO Yasir Arafat yang bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dan hal tersebut merupakan penghinaan bagi rakyat Arab. (Nadjib Ghadbian “The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”, hal 627). Hafiz al- Assad juga menolak melakukan hal ramah tamah kepada pemimpin Israel walaupun menteri luar negeri Suriah berjabat tangan dengan perdana menteri Israel.

Sebelum terjadinya intifada kedua, Suriah dan Israel sudah memulai hubungan yang semakin baik untuk mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak menyadari kepentingan atas kesepakatan damai tersebut. Setelah meninggalnya Hafiz, terlihat berbagai tanda kesediaan untuk melanjutkan perundingan. Namun Presiden baru, Bashar al- Assad, tidak juga mencanangkan proses tersebut. Kebijakan luar negeri selanjutnya adalah pendudukan tentara Suriah di Lebanon. Permintaan penarikan kembali pasukan militer Suriah di Lebanon semakin kencang seiring dengan penarikan kembali pasukan Israel dari Selatan Lebanon. Lebanon merupakan Negara yang menjadi pemisah antara Negara Suriah dan Israel. Banyak keuntungan yang didapat oleh Suriah atas kehadiran tentara Suriah di Negara tersebut. Ada tiga sector ekonomi yang di dapat Suriah atas pendudukan ini, yaitu para perwira militer dan keamanan Suriah terlibat dalam penyelundupan, pengusaha Suriah yang memanfaatkan bank Lebanon dan lembaga keuangan yang bersifat liberal, dan hampir setengah juta tenaga kerja Suriah yang sekarang ini bekerja di Lebanon. (Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria” hal. 629).

Namun keuntungan tidak hanya di dapat oleh pihak Suriah tetapi juga pihak Lebanon. Ada golongan Lebanon yang mendapat keuntungan atas pendudukan tentara Suriah tersebut, diantaranya adalah gerakan Hizbullah, yang mendapat dukungan kuat dari Suriah dan Iran selama gerakan tersebut berperang melawan Israel. Selanjutnya, Hizbullah bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik dan bekerja dari dalam sistem, mengadvokasi dan mendukung rakyat yang tertindas

dalam kehidupan masyarakat Lebanon. Sejauh ini, Hizbullah dapat memanfaatkan perannya dalam kemenangan atas pasukan Israel.

Penarikan kembali pasukan Israel dari Lebanon tidak membuat pasukan Hizbullah menerima begitu saja. Pemimpin golongan tersebut menginginkan bahwa untuk mencapai kesepakatan damai, Israel harus mengembalikan perkebunan Seb'a, sebuah wilayah yang Israel ambil pada perang tahun 1967, dan juga pembebasan tahanan- tahanan Lebanon dari penjara Israel, yang sebagian merupakan aktivis Hizbullah. Pihak Israel juga menghitung bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Israel untuk bertahan akan jauh lebih besar ketimbang penarikan mundur. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan keberadaan pasukan Israel di Lebanon, dan dengan penarikan mundur, Israel berharap juga dapat memperdalam keretakan antara Suriah dan Lebanon atas gagasan ketidak terpisahkan kepentingan. Banyak rakyat Lebanon menentang keberadaab pasukan Suriah dan penentang tersebut semakin hari semakin membesar. Mereka berpendapat bahwa kepentingan nasional Suriah dengan Lebanon tidaklah sama. Mendapat penentangan yang besar, gerakan Hizbullah mencari dukungan dari kelompok-kelompok pro- Suriah dan juga terus berusaha mentang usaha- usaha yang dilakukan Lebanon untuk berhenti bekerjasama dengan Suriah. Selain Hizbullah, keberadaan pasukan militer Suriah juga mendapat dukungan dari kelompok Syiah Lebanon "Amal", serta politisi Sunni Lebanon. (Nadjib Ghadbian " The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria". Hal. 630). Pada tanggal 14 Juni 2005 (penarikan tentara Suriah dari Lebanon), ribuan pasukan Suriah

dievakuasi dari sekitar Beirut dan menyerahkan berikde mereka kepada tentara Lebanon.

Pada Agustus 2001, tentara Lebanon menahan ratusan pendemo dan massa pro-oposisi Lebanon. Tindakan keras ini diambil akibat kemelut politik, sejak hal tersebut mengambil posisi tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Perdana Menteri, dan diikuti oleh vonis hukuman dari politisi dan anggota persatuan ahli hukum. Ketika sebagian besar demonstran di bebaskan secara langsung ataupun di berikan hukuman yang ringan, penangkapan tersebut merupakan pengingat dari pendukung Suriah dalam tentara Lebanon atas bahaya menjadi oposisi dari persaudaraan tentara Suriah atau “Brotherly Syrian Army”.(Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”.hal 631).

Ketika penarikan kembali seluruh tentara Suriah tidak dapat dihindari, kedua, Suriah dengan Lebanon, Negara yang mendapatkan keuntungan dari konflik Suriah di dalam Negara tersebut akan menentang pergerakan apapun yang akan mengancam kepentingan dan hak istimewa yang mereka dapatkan. Perang sipil di Lebanon telah menyebabkan Lebanon dan Suriah tidak mampu untuk tidak mencampuri masalah Negara masing- masing sejak hubungan anantara mereka terjalin ketika tentara Suriah memasuki wilayah Lebanon pada tahun 1967.

Kebijakan luar negeri Suriah Selanjutnya adalah hubungan antar pemimpin Negara-negara di sektor regional dan Internasional. Setelah dalam jangka waktu yang lama terisolasi hingga pada tahun 1980an, Hafiz al- Assad membuat strategi

dan menawarkan kembali bantuan agar Suriah dapat kembali hadir dalam tatanan dunia pasca perang dingin. Hafiz menyadari bahwa runtuhnya Uni Soviet sebagai penyokong utama Suriah dan juga salah satu pemeran utama dari perang dingin, dapat memperkeruh kondisi negaranya sehingga mempersulit Suriah untuk meraih kesamaan derajat dengan Israel. Untuk memulikan kembali kondisi dimana banyak sekutu Suriah yang hilang, namun juga mengambil kesempatan untuk menjadi salah satu Negara yang mengendalikan tatanan dunia, Hafiz al- Assad membuat keputusan untuk bergabung dengan koalisi Amerika untuk menentang Irak selama Perang Teluk tahun 1990 hingga 1991, walaupun hal tersebut sangat jelas melanggar keyakinan partai Ba'ath yang juga merupakan partai yang sama dengan pemerintahan Irak. Langkah berikutnya yang diambil Suriah adalah menghindari konferensi perdamaian di Madrid pada Oktober 1991. Langkah tersebut dapat membuat Suriah mendapatkan pinjaman dan bantuan keuangan dari Negara-negara Teluk, dan dapat memperlemah langkah rivalnya, Saddam Husein, memasuki proses yang akan membuat Suriah mendapatkan dataran tinggi Golan kembali, sehingga dapat meringankan beban negaranya untuk anggaran militer dan mengeluarkan Suriah dari Isolasi dan merubah pandangan public atas Suriah sebagai Negara miskin.

Saat ini, Suriah memiliki hubungan baik dengan Negara- Negara Teluk Arab, Iran, Mesir dan Jordania sepeninggalan Raja Husein. Selama tahun pertama Bashar al- Assad memerintah, Jordania dan Suriah telah menambah hubungan ekonomi bilateral. Dari segi politik, kedua Negara telah meningkatkan hubungan

mereka dan mengurangi kritik posisi masing- masing Negara terhadap Israel. Jordania telah mengungkapkan dukungannya terhadap Suriah dalam upaya mendapatkan kembali dataran tinggi Golan. Suriah telah membebaskan tahananannya yang berkebangsaan Jordania, ketika pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah meninggalkan pengasingannya di Amman, Jordania. Peningkatan hubungan antara dua Negara sejak kepergian Raja Husein dan Hafiz al- Assad, dapat di tunjukan sebagian dalam pergantian kepemimpinan dan kesamaan pandangan pragmatis atas pemimpin baru Damaskus dan Amman.(Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”hal.632).

Setelah menjadi Presiden, Bashar al- Assad juga memperbaiki hubungan antara pemerintah Suriah dengan Yasir Arafat. Semasa hidup Hafiz al- Assad, Arafat merupakan orang yang dengan penuh kegigihan menentang usaha Hafiz untuk menguasai PLO (Palestine Liberation Organisation atau pembebasan Palestina). Selama beberapa tahun, Yasir menjadi pesona non grata (istilah dalam bahasa latin yang artinya orang yang tidak di inginkan) di Damaskus. Masing- masing pihak menyalahkan atas ketiadaan kordinasi dalam negosiasi dengan Israel, yang mana memungkinkan pemerintah Israel memperlakukan salah satu pihak untuk yang lain.

2. Kebijakan Ekonomi

Kemimpinan Bashar di harapkan dapat memberikan perubahan- perubahan pada bidang perbaikan ekonomi, sistem politik, dan birokrasi. Menjelang berlangsungnya kepemimpinan Bashar al- Assad, telah beredar kabar bahwa akan ada perbaikan di bidang ekonomi dan sistem politik. Pada kedua bidang tersebut, Bashar mengerahkan dukungan penuh dan mempererat kekuasaannya. Sebelum kepergian ayahnya, Bashar telah melakukan kampanye anti korupsi, dan memecat Jendral Muhammad Bashir al- Najjar, yang merupakan kepala bagian intelejen dengan tuduhan korupsi. Al- Najjar dikeluarkan dari posisinya dan di jatuhkan hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan korupsi yang ia lakukan pada tahun 1998. Kampanye tersebut mencapai puncaknya dengan pembubaran kabinet dan pembentukan kabinet baru pada Maret 2000.(Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”. Hal 633). Kampanye tersebut membuat rakyat dan aktivis Suriah beranggapan bahwa Bashar akan menciptakan perubahan dalam Negara tersebut.

Pada masa pemerintahan Hafiz al- Assad, perekonomian Suriah berada di bawah Negara- Negara di sekitarnya dan ditambah dengan persoalan seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja yang melebihi jumlah lapangan kerja dan tidak tepat guna dalam mengelola keuangan Negara. Pendapatan perkapita Suriah sekitar 1.000 dollar, tertinggal jauh dengan Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar dan Israel 17.000 dollar. Pengangguran diperkirakan berjumlah 22% dan Negara membelanjakan lebih dari 7% dari PNB dan 50% dari anggaran adalah untuk

pembiayaan militer dan pasukan keamanan. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber daya alam, jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya bantuan luar negeri, korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 3,15%. (Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change Syria”. Hal 634).

Kondisi tersebut membuat pemuda Suriah bersedia mendukung segala kebijakan yang dapat memperbaiki perekonomian di Negara tersebut termasuk mendukung Bashar yang juga menggagas ide pembaharuan tersebut. Perekonomian Suriah membutuhkan perubahan struktural yang diadopsi dari Negara-negara sosialis Eropa Timur. Mendian Presiden Hafiz al-Assad melakukan liberalisasi ekonomi dengan setengah hati, yang mana termasuk pengokohan pada sektor swasta dan mendorong investasi asing. Peningkatan sektor bisnis di Suriah menjadi dukungan untuk Bashar dalam usahanya mengarahkan sektor ekonomi pada menuju ekonomi liberal yang mengarahkannya ke pasar bebas. Perbaikan ekonomi yang Bashar al- Assad canangkan pada awal penobatannya sebagai Presiden, tetap ia laksanakan. Namun, kerja kerasnya dalam memperbaiki perekonomian dalam negerinya hanya dirasakan oleh mereka yang dekat, memiliki hubungan, serta ikatan keluarga dengan rezim. Tekadnya untuk memberantas korupsi hanya sampai pada pidato- pidato awal pemerintahannya saja. (Kuncahyono, Muslim Semi di Suriah: Anak- anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal 75).

Tahun 2004, Suriah di kenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat yang membuat kegiatan eksport-import Negara tersebut terbatas dan sempat

menyebabkan gejolak anti pemerintah oleh kalangan rakyat Suriah. Banyak industri-industri produktif yang sbelumnya mampu menyerap banyak tenaga kerja muda, di bongkar pada saat Bashar al- Assad memerintah, sehingga memperbanyak pengangguran pada usia kerja. Perekonomian diubah menjadi perokonomian rente yang di kontrol dan di kuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim yang berkuasa. Sebanyak 81% lulusan perguruan tinggi membutuhkan waktu paling kurang empat tahun untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun 1996 yaitu 583.000 barrel.(Kuncahyono, Muslim Semi di Suriah: Anak- anak Sekolah Penyulut Revolusi,hal 88).

3. Kebijakan Politik

Bashar mewarisi sistem politik satu partai, yang di dominasi oleh militer yang beraliran sekte Alawi. Sistem tersebut terdiri dari pemerintahan resmi dan pemerintahan bayangan. Pada pemerintahan resmi, terdapat institusi seperti kabinet, parlemen, kepengurusan partai Ba'ath, dan beberapa partai kecil.keputusan yang sebenarnya di buat di belakang pemerintahan resmi tersebut, pada sebuah golongan kecil yang berisikan kepala pemerintahan yang bertugas untuk memelihara kestabilan rezim. Hanna Batatu, seorang ahli sejarah Timur Tengah, mengemukakan bahwa 61% dari pemerintahan bayangan tersebut menganut sekte Alawi. Pemerintahan bayangan ini memberikan jawaban kepada Presiden yang bersifat

mutlak. Orang-orang yang berada di luar area pemerintahan dapat tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan tenang selama mereka tidak ikut campur dalam keputusan politik.

Dari sudut pandang ekonomi politik, pada bagian hak istimewa di dalam lapisan strata sosial Suriah, sistem ekonomi di Suriah di dominasi oleh tiga golongan; pertama, pemimpin di sektor publik, kedua pengusaha kelas kecil, ketiga pelindung kegiatan mereka yaitu dari kalangan keamanan dan elit militer. Siapapun yang bekerja sebagai aparat Negara tidak dapat tersentuh dari hukum, sehingga dapat memperkaya diri. Hal tersebut dibiarkan oleh mendiang Presiden, Hafiz al-Assad, untuk kalangan yang telah setia kepadanya, dan sanggup untuk melakukan segala cara untuk memelihara keamanan dan stabilitas rezim. Contoh penerapan dari pemeliharaan keamanan era Hafiz al-Assad adalah pada tahun 1982 ketika pasukan keamanan dan elit militer, membombardir kota Hama, yang menelan ratusan warga sipil. (Riza Shibudi, *Menyandera Timur Tengah*, hal 34).

Pada tahun pertama pemerintahan Bashar, orang-orang yang bekerja di pemerintahannya tidak akan di tolerir jika tersangkut kasus korupsi. Bashar juga memperbaharui sektor-sektor Negara namun tetap mempertahankan struktur politik yang ada. Kemimpinan Bashar menjadi harapan baru bagi rakyat Suriah. Adanya iklim politik yang baru di Suriah pada saat itu membuat para cendekiawan Suriah yang tergabung dalam “Kelompok 99” (kelompok 99 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang aktivis, pengacara, dosen, musisi, dll), melayangkan surat terbuka untuk meminta Presiden segera menghentikan keadaan darurat militer yang

berlaku sejak tahun 1963, membebaskan para tahanan politik dan mengizinkan orang-orang Suriah yang di asingkan untuk dapat kembali. Serta mengabulkan kebebasan politik termasuk bebas berekspresi dan kebebasan pers. Kelompok lain yang mengatasnamakan dirinya sebagai “ Friends of Civil Society” juga mengeluarkan petisi serupa yang di sebut “ Manifesto 1000”. Pada manifesto tersebut, menyatakan kembali keinginan yang sama dengan surat dari kelompok sebelumnya dan juga menambahkan acuan untuk masyarakat sipil dan keberagaman politik di Suriah. Tokoh terkemuka pada pergerakan ini adalah Riyad Sayf (seorang oposisi Suriah dan pengusaha terkemuka yang mendirikan forum dialog Nasional). Perkembangan selanjutnya terjadi forum-forum diskusi yang luas di berbagai tempat yang membahas tentang masyarakat sipil, pluralism, hak- hak asasi manusia.

Permintaan selanjutnya datang dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan Bashar tidaklah sah dan meminta untuk agar kepemimpinan dapat di pilih secara terbuka. Permintaan selanjutnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin sama dengan permintaan “ Friends of Civil Society“, namun ada penambahan bahwa pergerakan tersebut harus mendapatkan status resmi di dalam negeri, karena sebelumnya menjadi anggota dari Ikhwanul Muslimin adalah terlarang dan dapat di jatuhi hukuman mati.

Dari petisi-petisi tersebut, Suriah mengalami perubahan yang signifikan. Pada 16 November 2000, pemerintah Suriah membebaskan 600 tahanan politik, anggota partai Ba’ath Irak, dan anggota komunis. Selanjutnya, pemerintah Suriah juga mensahkan pendirian surat kabar swasta, al- Dumari. Minat baca rakyat Suriah

meningkat hingga di cetak 75.000 eksemplar pada edisi pertama surat kabar tersebut. Pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan sayap dari partai komunis Suriah yang telah setia kepada rezim Ba'ath untuk menerbitkan surat kabar "Suara Rakyat". Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi sebagian besar rakyat Suriah. Namun, kalangan intelektual dan oposisi menginginkan lebih hingga penghapusan menyeluruh atas darurat militer.

Setelah enam bulan semenjak pelantikannya sebagai Presiden, dan segala perubahan yang ia setujui, Bashar al- Assad berubah pikiran. Masa sebelum Bashar menjabat kembali berlangsung. Forum – forum diskusi dibatasi dan harus mengikutsertakan petugas keamanan. Siapapun yang ingin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan harus meminta izin seminggu sebelumnya, dan menyertakan informasi tentang topic pembicaraan, pembicara, tamu undangan, dan materi pembicara.

Ada dua alasan untuk membatasi aktifitas kelompok intelektual. Pertama, keputusan para petinggi rezim dan penjaga keamanan yang merasa bahwa kritikan yang begitu tajam dan lantang terhadap pemerintah jika tidak ditekan dapat meningkat dan dapat mengancam stabilitas Negara. Kedua, untuk membungkam kelompok intelektual tersebut sehingga keinginan mereka akan adanya perubahan dalam segi politik dan reformasi rezim terhenti.

Pasca pencabutan segala permohonan yang dilayangkan dalam petisi maupun surat terbuka oleh rakyat, kepemimpinan Bashar al-Assad berubah dari image pembawa

perubahan menjadi sama dengan kepemimpinan mendiang Hafiz al- Assad, diktatoris. Gerakan tersebut belakangan di kenal dengan “Damaskus Spring” kurang mendapat antusiasme dari mayoritas rakyat Suriah. Misi gerakan tersebut tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Suriah yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Gerakan tersebut juga hadir bersamaan dengan pecahnya intifada kedua di Palestina. Para intelektual penggagas petisi dan surat terbuka mengusung gagasan- gagasan Barat, suatu hal yang bertentangan dengan semangat anti- Israel dan Barat tersebut. Damaskus Spring dengan umur yang pendek namun mampu menginspirasi lahirnya partai- partai oposisi di pengasingan luar Suriah. Salah satunya adalah partai pembaharuan Suriah atau Hizb al- Islah al- Suri, yang didirikan oleh seorang pengusaha Amerika- Suriah, Farid Nahid al- Ghadiri.

D. Awal Mula Konflik Suriah Kontemporer

Konflik Suriah telah berlangsung sejak Maret 2011. Konflik ini merupakan lanjutan dari gelombang Arab Spring dimana warga di beberapa negara Afrika Utara dan Timur Tengah memprotes pemerintahan mereka dan melakukan aksi demonstrasi untuk menggulingkan penguasa. Mereka menuntut adanya revolusi pemerintahan yang lebih demokratis. Gelombang Arab Spring ini dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya kemudian berlanjut ke Suriah. Pasukan oposisi di Suriah memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Assad dan keluarganya yang telah berkuasa kurang lebih selama empat dekade.

Aksi demonstrasi penduduk disikapi pemerintah Suriah dengan sikap represif. Dalam kasus Libya dan Suriah pemerintahan berkuasa sama-sama melakukan serangan militer terhadap pasukan oposisi. (Mu Ren, "Interpreting China's (Non-) Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis." *International Research Ritsumeikan* 27.1 (2014): 259-282). Melihat sikap pemerintah tersebut warga Suriah kemudian mulai melakukan serangan balasan. Pada bulan Juli 2011, ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri. Pendukung oposisi akhirnya mulai mengangkat senjata dengan tujuan untuk mempertahankan diri mereka dan juga untuk mengusir pasukan pemerintah dari daerah lokal mereka. ("Syria : The Story of the Conflict" BBC. 05 Oktober 2015). Situasi kekerasan yang terus meningkat dengan serangan terus menerus dari pihak pemerintah dan munculnya pemberontak bersenjata pada akhirnya menyebabkan perang saudara pecah di Suriah. Konflik yang awalnya bermula di kota Deera dan berbagai kota kecil lainnya ini meluas sampai ke Ibukota Damaskus dan juga Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah. Pasukan oposisi berhasil merebut sebagian wilayah-wilayah di Suriah, sementara pasukan pemerintah terus menyerang pihak oposisi. Menurut data PBB selama tiga tahun konflik terjadi, lebih dari 100 ribu warga tewas serta lebih dari 2 juta orang mengungsi menuju ke negara-negara tetangga. (Ren, "The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist," 259-282)

Konflik Suriah ini kemudian berkembang tidak lagi pertempuran antara pemerintahan Presiden Assad dan kelompok oposisi tetapi muncul juga kelompok-kelompok sektarian yang melawan pemerintah. Dimensi konflik kian bertambah

dengan munculnya kelompok jihad seperti Islamic State membuat konflik Suriah semakin bertambah kompleks. Negara-negara tetangga dan negara maju yang berkepentingan pada akhirnya juga terlibat dalam konflik Suriah. Adanya pelanggaran hak asasi manusia menjadi jalan masuk bagi Barat untuk medesak Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan aksi. DK PBB kemudian mengajukan resolusi untuk mengatasi konflik Suriah. Namun penyelesaian masalah melalui resolusi ini juga belum membuahkan hasil. Cina bersama dengan Rusia telah memveto empat kali resolusi DK PBB terutama yang berkaitan dengan usaha intervensi kedaulatan Suriah. Sikap aktif Cina dalam hubungan internasional ini dapat dianggap sebagai sebuah anomali. Dalam hal hubungan internasional, Cina selama ini cenderung mengambil langkah pasif. (Hannah Beech, "China's View on Syria Crisis: America's "Hidden Motivations" Are Leading It Astray," Time.)

Konflik di Suriah ini, cukup menyita perhatian Dunia. Tercermin dari banyaknya pihak yang terlibat disana. Ada Iran, Rusia, Amerika Serikat dan Israel serta tentu saja PBB. Jika dipetakan secara umum, kekuatan di atas terbagi atas dua kekuatan utama. Rezim yang berkuasa di Suriah, pimpinan Presiden Bashar Al-Assad, didukung oleh Iran dan Rusia. Sementara kekuatan oposisi yang ingin menjatuhkan Assad, didukung Amerika Serikat, Israel, sejumlah negara Eropa Barat, serta beberapa negara Islam di Timur Tengah (Arab Saudi dan Qatar) serta negara Islam dari Persia (Turki). PBB juga terlibat atau melibatkan diri dalam upaya mendamaikan perang saudara di Suriah. Tapi sebagaimana biasa, keberpihakan PBB ke rezim yang berkuasa, justru lebih ke pihak Amerika Serikat atau setidaknya

terkesan setengah hati. Jatuh tidaknya Presiden Assad, sesungguhnya tidak lagi menjadi isu utama. Sebab kalau Assad dikeroyok oleh berbagai kekuatan, nasibnya dan negaranya kemungkinan besar akan sama dengan Muammar Khadafy (Lybia) dan Ben Ali (Tunisia). Tetapi yang paling dkuatirkan, jika perang saudara Suriah berlarut, konflik itu akan sama dengan persoalan Palestina-Israel. Setengah abad pun tidak selesai. Bahkan bukan mustahil, pecahannya akan lebih dahsyat dan dapat mengganggu keseimbangan perdamaian Dunia.